

**ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL
PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Sintuwu Maroso

Oleh :
DESLINA RIBKAH
192111404122124

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2024**

DESLINA RIBKAH, NPM: 192111404122124 dengan judul skripsi “Analisis Penyusunan Laporan Operasional Pada Kantor Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.”, dibawah bimbingan **Sudarto Usuli** dan **Ni Kadek Sriwati**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyusunan Laporan Operasional Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, dengan populasi seluruh Laporan Operasional dan yang dijadikan sampel adalah Laporan Operasional Tahun 2021-2023 dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui, wawancara dan dokumentasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyajian Laporan Operasional (LO) dimaksudkan untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual. Hal ini memberikan nilai prediksi LO, karena data tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah uang yang akan diterima untuk mendanai operasional pemerintah pada periode mendatang. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi pada Kantor Bagian Organisasi masih kurang, sehingga menyebabkan masih kurangnya pemahaman aparatur tentang Laporan Operasional yang memiliki keterkaitan dengan komponen laporan keuangan lainnya, yaitu antara Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca yang dapat dipertanggung jawabkan dalam penyajiannya serta implementasi penyajian laporan operasional berbasis akrual pada Kantor Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penyusunan Laporan Operasional yang dilakukan di Kantor Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menggunakan penyajian Laporan Operasional berbasis akrual berdasarkan secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Kata Kunci: Laporan Operasional



DESLINA RIBKAH, NPM: 192111404122124. "**Analysis of the Preparation of Operational Reports at the Organizational Section Office of the Regional Secretariat of Morowali Utara Regency.**" Supervised by Sudarto Usuli and Ni Kadek Sriwati

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the preparation of operational reports in the Organization Section of the Regional Secretariat of Morowali Utara Regency. This research was carried out at the Organizational Section of the Regional Secretariat of Morowali Utara Regency, with a population of all Operational Reports and the samples were the 2021-2023 Operational Reports using quantitative methods. The data used is primary data and secondary data. Data was collected through interviews and documentation.

Research findings show that the presentation of the Operational Report (LO) is intended to complement the accrual-based reporting and accounting cycle. This provides LO predictive value, because the data can be used to estimate the amount of money that will be received to fund government operations in the coming period. There is still a lack of Human Resources (HR) who have an educational background in accounting in the Organizational Section Office, resulting in a lack of understanding among the apparatus regarding Operational Reports which are related to other financial report components, namely the Operational Report (LO), the Report on Changes in Equity (LPE).) and a Balance Sheet that can be accounted for in its presentation and implementation of the presentation of accrual-based operational reports at the Organizational Section Office of the Regional Secretariat of Morowali Utara Regency, Sulawesi Tengah Province. In preparing the Operational Report which was carried out at the Organizational Section Office of the Regional Secretariat of Morowali Utara Regency, the presentation of the Operational Report on an accrual basis was used as a whole in accordance with PSAP No. 12 Regarding Operational Reports so that they can be accounted for.

Keywords: *Operational Report*

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
2.1. Tinjauan Pustaka	7
2.1.1. Pengertian Keuangan Daerah	7
2.1.2. Laporan Keuangan Daerah	8
2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.1.4. Laporan Operasional	14
2.2. Matriks Penelitian Terdahulu	16
2.3. Kerangka Pemikiran	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	19
3.2. Metode Penelitian	19
3.3 Jenis Sumber dan Tehnik Pengumpulan data	19
3.4 Tehnik Pengumpulan data	19
3.5 Populasi Dan sampel	20
3.6 Teknik Analisis Data	20
3.7. Definisi Operasional	20

BAB IV HASIL PENELITIAN	22
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan	22
4.1.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian	22
4.1.2 Profil Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara	23
4.1.3 Struktur Organisasi	27
4.2 Pembahasan	28
4.2.1 Struktur Laporan operasional	29
4.2.2 Laporan Operasional	30
4.2.3 Penyajian Laporan Operasiuonal Berdasarkan Akrual	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan adanya perubahan dalam cara penerapan kebijakan pemerintah dan desentralisasi fiskal yang menekankan pada pemerintahan daerah, pertumbuhan akuntansi sektor publik semakin cepat, khususnya di Indonesia. Saat ini, fenomena meningkatnya ekspektasi tanggung jawab terhadap lembaga-lembaga publik di tingkat nasional dan daerah menjadi ciri khas praktik pengelolaan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu entitas sektor publik dipertanggungjawabkan melalui penyampaian laporan keuangan yang dikenal dengan laporan pertanggungjawaban.

Laporan operasional adalah dokumen yang merinci seluruh operasi keuangan organisasi pelapor, seperti yang terlihat pada pendapatan LO, biaya, dan surplus/defisit operasional, dan membandingkan informasi tersebut dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional, menurut Ratmono (2015), mencakup ringkasan sumber daya keuangan yang meningkatkan pemerataan dan diawasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Pencatatan transaksi-transaksi tersebut akan disusun menjadi suatu laporan keuangan dalam bentuk laporan apabila berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 peristiwa atau transaksi hanya dicatat jika uang tunai telah diterima atau dibayarkan, tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Peristiwa atau

transaksi harus dicatat pada periode terjadinya. berfungsi. Seluruh OPD termasuk Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara bertanggung jawab dalam penyusunan laporan operasional ini. Semua organisasi perangkat daerah yang menangani barang atau menerima anggaran belanja dianggap sebagai entitas akuntansi dan wajib melakukan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam rangka penggabungan laporan keuangan, laporan keuangan tersebut disampaikan baik secara internal maupun bertahap kepada unit yang lebih tinggi. oleh organisasi yang melaporkan.

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional yang merupakan standar akuntansi pemerintahan yang sesuai. Definisi, pencatatan, identifikasi, dan pelaporan pendapatan dan biaya LO dalam satu periode pelaporan adalah beberapa topik yang dibahas dalam PSAP No. 12. Laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan dengan menggunakan konsep akuntansi yang dikenal dengan standar akuntansi pemerintah.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia, SAP merupakan sebuah mandat yang memiliki kedudukan hukum. SAP diwajibkan untuk memberikan keseragaman pelaporan keuangan sektor publik. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dibuat dan disajikan sesuai dengan SAP yang tercantum dalam PP No 71 Tahun 2010 baik bentuk maupun isinya (Bastian, 2010).

Indra Bastian (Singkali, 2014) mengartikan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai “Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Biasa juga disebut dengan SAP. Oleh karena itu, SAP merupakan amanah dengan legal standing yang bertujuan untuk meningkatkan standar pelaporan keuangan pemerintah Indonesia. Menurut Kusumah (2012), “Kepala OPD sebagai pengguna anggaran wajib melakukan pencatatan akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”.

Berdasarkan temuan penelitian (Yosi Nopita Sari, 2022), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diikuti ketika penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi. Layanan Tenaga Kerja. Berdasarkan temuan penelitian (Amelia Fahira & Rini Indahwat, 2020), Laporan Operasional disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Jayapura sesuai dengan PSAP No.12 tentang laporan operasional secara keseluruhan.

Demikian juga penelitian yang dilakukan (Musdalifah Dj. Umar, 2018) bahwa penyusunan laporan operasional telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jika dilihat dari hal tersebut maka pentingnya didalam penyusunan laporan operasional tersebut harus didasarkan dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Adapun tugas pokok Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu membantu Bupati dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah.

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2021–2023 (khususnya laporan operasional) memuat unsur-unsur yang diperlukan agar dapat disajikan secara wajar sebagai berikut: pendapatan–LO, pengeluaran, surplus/defisit usaha, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit–LO. Dalam rangka menelaah keadaan keuangan dan mengetahui efektifitas dan efisiensi lembaga pelapor dalam memenuhi peraturan perundang-undangan, dilaksanakan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini melibatkan perbandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang direncanakan.

Diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami sepenuhnya keadaan dunia nyata seputar kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Pernyataan ini ditandai dengan penilaian kesesuaian informasi yang diungkapkan dan persyaratan untuk mengkonfirmasi tanggapan. Hal ini disebabkan karena beberapa LKPD belum dapat menerima tanggapan WTP, masih adanya permasalahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Komentar badan audit keuangan dapat digunakan untuk menilai

kualitas pelaporan keuangan. Hasil pemeriksaan dipegang oleh BPK dan digunakan untuk menilai laporan keuangan dengan berbagai cara. Hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan sebagai pendapat oleh BPK dan dianggap sebagai pendapat tertinggi; mereka wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, dan tidak masuk akal, selain tidak menyatakan pendapat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penyusunan Laporan Operasional Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahnya yaitu Bagaimana Penyusunan Laporan Operasional Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Kantor Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara .
- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang akan mengadakan penelitian berkaitan dengan masalah ini.

- 3) Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual penuh*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 Tentang Laporan Operasional. *PSAP No. 12*.
- Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara*.
- Amelia Fahira & Rini Indahwat, (2020) Analisis Penerapan PSAP NO. 12 Tentang *Laporan Operasional Pada Inspektorat Kabupaten Jayapura*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting.
- Bastian, (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit. Erlangga :Jakarta.
- Halim, (2002) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*, Salemba empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015) *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.
- Musdalifah Dj. Umar, (2018) Analisis Penyajian Laporan Operasional Berbasis Akrual Pada Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Propinsi Sulawesi Tengah. *Tesis*.
- Ratmono (2015) *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis. Akrual*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Singkali, (2014) “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Toraja Utara”, *Journal Tax & Accounting Review*, Vol 4, No 2, 2014

Yosi Nopita Sari, (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Berbasis Akrua Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmia Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761*